

TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI VAKSIN PERBANKAN 2021

Oleh Tim Riset Stabilitas LPPI

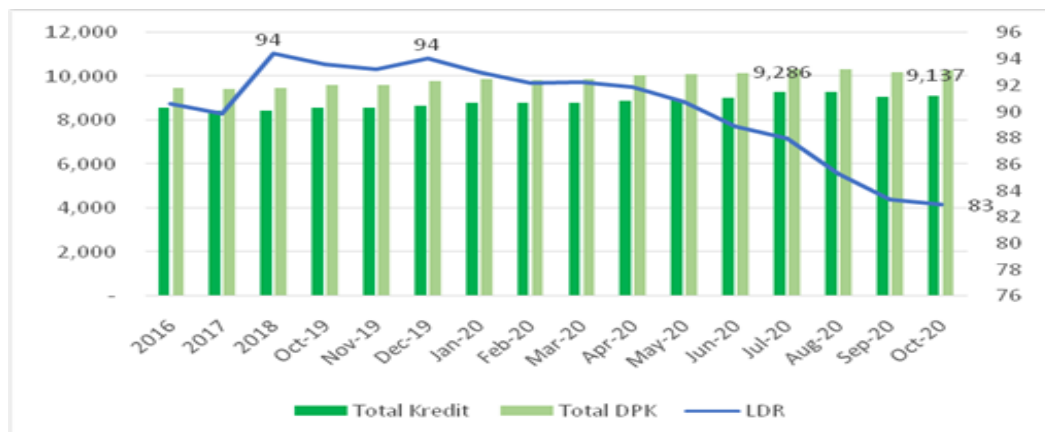
Bangkitnya sektor keuangan –dan perbankan pada khususnya– di tahun 2021 tergantung pada seberapa cepat dan efektif vaksinasi covid-19 bisa dilakukan di Indonesia. Arti cepat di sini berhubungan dengan jumlah dosis vaksinasi yang diberikan kepada masyarakat. Idealnya, bisa mencakup 70 persen dari total penduduk, untuk menciptakan herd immunity. Sedangkan efektif artinya vaksinasi berjalan lancar dan menghentikan penyebaran virus Covid-19. Jika skenario cepat dan efektif bisa terpenuhi, maka menjelang akhir 2021 kehidupan bisa kembali normal.

Tahun ini optimisme perbankan membunyah. Pemulihan yang diprediksi akan muncul tahun ini, meski demikian harus direspons oleh perbankan dengan persiapan yang matang dalam hal teknologi informasi.

Bagi perbankan, dengan prediksi kondisi ekonomi sudah normal di akhir 2021 karena proses vaksinasi sudah dilaksanakan, terdapat dua hal yang tidak biasa yang akan mendukung kinerja perbankan. Pertama adalah keberadaan Sovereign Wealth Fund dan membanjirnya dana miliaran dollar AS ke emerging market akibat stimulus Pemerintah Amerika Serikat untuk mengatasi pandemi Covid-19. Dua hal tersebut akan menjadikan likuiditas domestik meningkat. Alhasil, perbankan dan dunia keuangan bisa bernafas lebih lega.

Seperti diketahui, posisi likuiditas nasional saat ini tengah ketat. Selama kurun waktu 2016 hingga Oktober 2020, angka LDR tertinggi terjadi pada tahun 2018 dan Desember 2019 yang mencapai angka 94 persen. Memasuki pertengahan tahun 2020, angka LDR menurun terus hingga menyentuh angka 83 persen di Oktober 2020, yang berarti berada di bawah ketentuan OJK sebesar 85 persen. Rendahnya angka LDR ini disebabkan kenaikan dana pihak ketiga. Semua angka-angka tersebut berbalik ketika corona melanda dunia dan Indonesia. Terlihat bahwa memasuki bulan Juli 2020, angka LDR semakin rendah. Perbankan berupaya keras untuk menggenggam likuiditas yang dimiliki untuk berjaga-jaga terhadap ketidakpastian ekonomi akibat pandemi. Info lebih lanjut bisa dilihat di gambar 1.

Gambar 1
Perkembangan LDR, Dana Pihak Ketiga dan Penyaluran Kredit

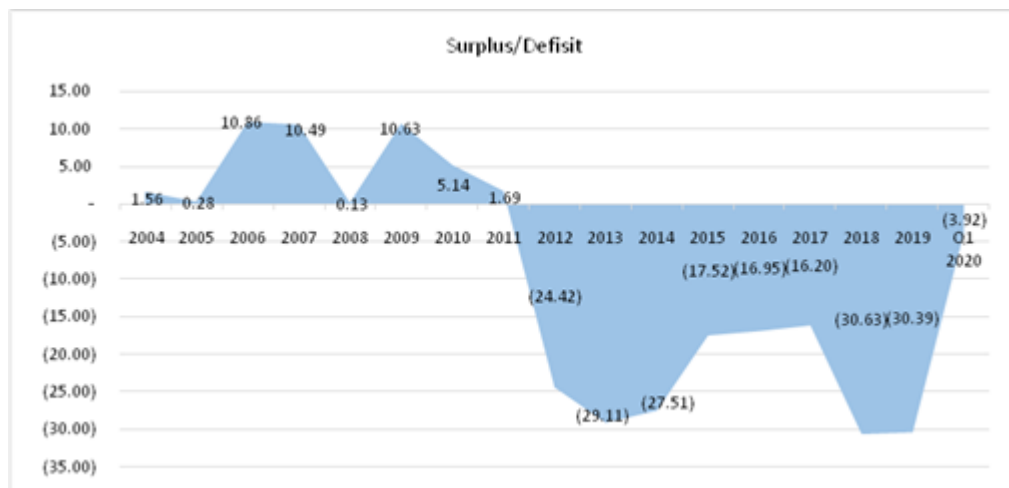


Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia

Sinyal likuiditas ketat berikutnya adalah keterbatasan dana dalam negeri adalah untuk investasi secara umum yang bisa dilihat dari fenomena saving-investment gap yang bisa dilihat dari current account defisit Indonesia. Pada 2019, current account defisit Indonesia mencapai 30,39 miliar dollar AS. Selain itu, tingginya suku bunga domestik juga menjadi cerminan hal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah tempat menarik untuk memutar uang di tengah keterbatasan sumber modal domestik.

Gambar 2
Perkembangan Current Account Indonesia 2004-QI 2020 (Miliar USD)



Sumber : Statistik Ekonomi & Keuangan Indonesia, www.bi.gi.id

Seperti tubuh manusia, yang membutuhkan darah, perekonomian juga membutuhkan likuiditas. Bagi Indonesia pada 2021 ini, terdapat dua sumber likuiditas yang bisa mendorong perekonomian sekaligus mendorong kinerja perbankan. Pertama adalah adanya lembaga sovereign wealth fund (SWF) yang akan mulai beroperasi pada tahun 2021. Kemudian, banjir stimulus Corona Amerika Serikat.

Pembentukan sovereign wealth fund (SWF) akan memberi dampak langsung berupa terselenggaranya kegiatan investasi proyek-proyek strategis nasional yang akan menciptakan aktivitas ekonomi turunan atau driven demand. Permintaan turunan ini akan menggairahkan kinerja perbankan dalam hal penyaluran kredit modal kerja dan investasi, terutama di sektor-sektor yang memiliki hubungan erat dengan proyek-proyek strategis yang didanai oleh dan SWF Indonesia. Selain itu, pembentukan SWF juga akan memperluas pasar keuangan domestik sehingga akan turut berimbas pada kenaikan likuiditas di Indonesia.

FAKTOR EKSTERNAL

Faktor kedua adalah stimulus dari AS untuk Pandemi Covid-19. Pada tanggal 20 Desember 2020, Kongres AS telah mencapai kesepakatan soal paket stimulus virus corona (Covid-19) sebesar 900 miliar dollar AS. Jika menggunakan kurs Rp14.100, maka nilai rupiahnya mencapai sekitar Rp12.690 triliun. Stimulus tersebut direncanakan akan digunakan untuk bantuan langsung dalam rangka mendorong demand side perekonomian AS.

Beragam program tersebut antara lain adalah bantuan langsung dari pemerintah sebesar 600 dollar AS untuk orang dewasa dan 600 dollar AS per anak, program perlindungan gaji untuk pinjaman UKM, dan bantuan kredit, hibah kepada UKM. Juga ada bantuan untuk penyedia jasa tempat live event, subsidi



Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia

pengangguran sebesar 300 dollar AS per orang, bantuan untuk rumah sakit yang belakangan kian dibanjiri pasien, dan bantuan untuk sekolah dan perguruan tinggi senilai 82 miliar dollar AS.

Beragam stimulus tersebut akan menjadi kunci bagi pemulihan ekonomi AS, selain keberhasilan vaksinasi yang saat ini sudah dilaksanakan di Amerika Serikat. Setelah negeri Paman Sam itu pulih, maka dana stimulus yang telah dikucurkan oleh pemerintah tersebut akan menyerbu emerging market. Pola ini sama dengan sewaktu pemerintah AS mengeluarkan bailout dan stimulus untuk menangani krisis akibat subprime mortgage di tahun 2008 silam.

Selain itu, kemenangan Joe Biden atas Donald Trump dalam pemilihan Presiden AS menjadi sinyal bahwa level proteksionisme AS akan berkurang. Alhasil ada dua keuntungan yang bisa dipetik sekaligus yakni pasar ekspor dan mengalirnya portfolio, terutama FDI, ke emerging market. Berkurangnya proteksionisme AS akan berdampak pada longgarnya ekspor ke Negara itu, terlebih setelah Indonesia mendapatkan perpanjangan fasilitas GSP (Generalized System of Preferences) kepada Indonesia. Fasilitas ini akan menjaga pasar ekspor Indonesia di AS.

Aliran FDI akan menjadi catatan menarik bagi Indonesia pasca kemenangan Biden dan Covid-19. Di bawah Biden, Amerika Serikat akan lebih terbuka. Hal ini mengingatkan Partai Demokrat sebagai partai asal Biden cenderung lebih globalist dibandingkan dengan Partai Republik yang level globalis-nya ada di bawah Demokrat. Sejalan dengan itu, Amerika Serikat di bawah Biden diprediksi akan tetap menjaga jarak dengan China dan sebagai gantinya, Amerika Serikat akan mengalihkan FDI mereka ke negaranegara lain di Asia Tenggara. Di sinilah Indonesia harus mengambil kesempatan/keuntungan tersebut.

Banjirnya likuiditas tersebut menjadi pedang bermata dua bagi perbankan di Indonesia. Hal ini tidak bisa dilepaskan dengan berkembangnya teknologi informasi di Indonesia. Adopsi teknologi informasi dalam layanan jasa keuangan adalah keniscayaan. Layanan perbankan atau industri jasa keuangan yang berbasis teknologi informasi akan memberikan efisiensi dan efektivitas bagi penyedia jasa. Bagi perbankan atau pelaku industri keuangan yang tidak bisa beradaptasi dengan penggunaan teknologi informasi akan ketinggalan jauh dengan perbankan yang mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam layanan mereka.

TEKNOLOGI INFORMASI

Pemerintah sebagai regulator, harus mendorong pemanfaatan momentum tersebut agar perbankan bisa mengambil cuan yang ada. Satu hal penting bagi pemerintah adalah bagaimana menyediakan akses internet ke pelosok-pelosok daerah di Tanah Air. Bagi daerah perkotaan, jaringan internet sudah cukup memadai, tinggal bagaimana mendorong penetrasi internet di daerah perdesaan. Pastinya, tidak semua daerah menjadi prioritas mengingat keterbatasan anggaran pemerintah. Memilih daerah mana yang akan di push akses internetnya bisa mempertimbangkan potensi daerah yang bisa secara cepat diutilisasi menjadi komoditas ekonomi. Setelah itu baru bergerak ke daerah layer kedua yang pemanfaatan potensi ekonominya membutuhkan waktu lebih.

Seperti diketahui, belum semua wilayah di Indonesia, terutama daerah perdesaan. Selain itu juga tidak semua warga pedesaan belum memiliki akses tabungan atau kepemilikan rekening tabungan. Gambar 3 menginformasikan hal tersebut. Secara umum, tidak ada kecenderungan daerah perdesaan per kabupaten dengan sinyal kuat memiliki persentase penduduk dengan akses rekening tabungan dan kepemilikan HP.

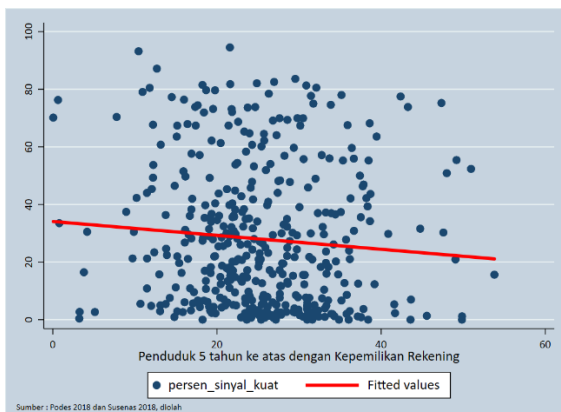
Gambar sisi kiri menginfokandua variabel persentase desa di level kabupaten dengan sinyal kuat dan persentase penduduk perdesaan usia 5 tahun ke atas dengan kepemilikan rekening tabungan. Ada kecenderungan kabupaten dengan jumlah penduduk yang memiliki rekening semakin besar berada di



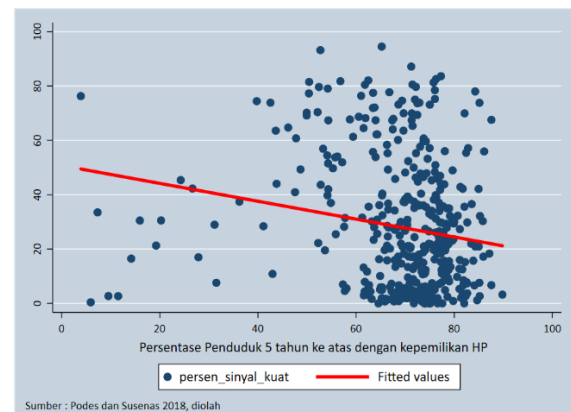
kabupaten yang persentase desa sinyal kuatnya kecil. Hal yang sama juga terjadi di kabupaten dengan persentase penduduk dengan akses HP semakin besar, berada di kabupaten dengan persentase desa sinyal kuat yang semakin sedikit.

Gambar 3
Kondisi Level Kabupaten Tahun 2018

Persentase Perdesaan dengan Sinyal Kuat dan Persentase Penduduk 5 Tahun yang Memiliki Rekening

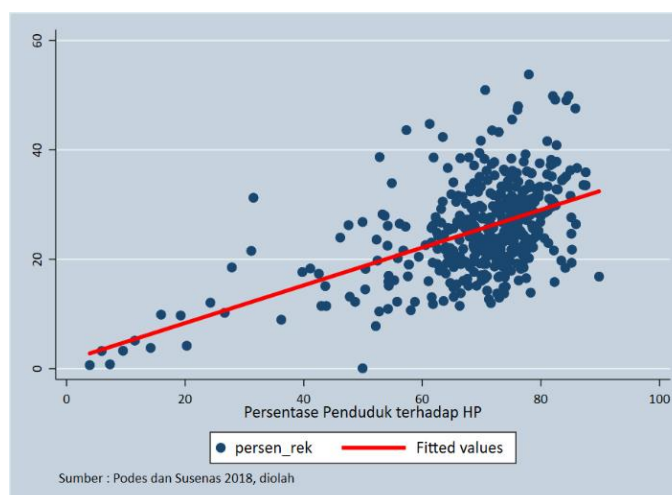


Persentase Perdesaan dengan Sinyal Kuat dan Persentase Penduduk 5 Tahun yang Memiliki Rekening



Informasi yang disajikan dalam gambar tiga mengkonfirmasi bahwa kebijakan peningkatan persentase desa dengan sinyal kuat akan membantu mendongkrak literasi keuangan. Hal ini didasari pada informasi yang tersaji di gambar 4 yang menginformasikan bahwa semakin banyak penduduk yang memiliki akses terhadap HP, semakin besar penduduk di daerah tersebut yang memiliki akses terhadap kepemilikan rekening tabungan.

Persentase Pedesaan dengan Akses Penduduk terhadap HP & Kepemilikan Rekening Tabungan di Indonesia (Untuk Level Kabupaten) Tahun 2018



Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia

Apa yang harus dilakukan oleh para pelaku industri perbankan? Covid-19 menjadi tonggak penting bagaimana pentingnya digitalisasi dalam mendukung kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, berdama dengan digitalisasi adalah sebuah keniscayaan bagi perbankan untuk bertahan dan memetik manfaat pasca pandemi covid-19. Lebih lanjut, digitalisasi ini tidak hanya bagaimana layanan perbankan bisa sampai ke pelosok desa, tapi bagaimana masyarakat melek keuangan atau dengan kata lain melek literasi keuangan.

Setidaknya perbankan harus, pertama merger, kedua menambah layanan digital mereka dan ketiga menjalin kerjasama korporasi dengan provider internet. Merger menjadi pilihan yang mempersyaratkan pertimbangan rasional yang komplet, terutama untuk bank-bank yang memiliki aset kecil seperti BPR, BPRS dan bank-bank Buku I. Merger akan menjadi senjata ampuh untuk tetap bertahan di derasnya tekanan teknologi informasi pada sektor perbankan.

Merger bank yang berujung pada peningkatan aset bank akan menambah kemampuan ekspansi bank tersebut. Ekspansi yang dimaksud bukan lagi ekspansi kantor fisik, tapi ekspansi layanan digital hingga ke pelosok.

Lebih lanjut, agar ekspansi layanan digital semakin mudah, kerjasama menjalin kemitraan dengan providerinternet menjadi opsi yang boleh dipertimbangkan. Lebih spesifik, kerjasama dengan provider bisa menasar pada aspek spesifikasi wilayah. Spesifikasi wilayah ini mencakup potensi ekonomi, demografi penduduk, dan kondisi sosial budaya. Contohnya adalah bank dengan core usaha sektor properti, menasar daerah peri-peri atau hinterland kota menjadi pilihan bijak. Hal ini disebabkan daerah hinterland kota yang dipenuhi dengan pembangunan perumahan-perumahan baru.

Kemudian, melihat demografi penduduk milenial yang masih belum memiliki income stabil, maka menjalin kerjasama dengan provider yang memberikan kemudahan top-up paket data internet pecahan rupiah kecil menjadi solusi. Akan berbeda misalnya jika umur penduduk di atas 30 tahun yang sudah memiliki stable income dimana akses internet sudah menjadi kebutuhan sehari-hari dan lebih cenderung memilih kepada provider internet yang stabil dan memberikan pilihan top up data nominal besar.

Beragam alternatif solusi di atas akan bisa dengan mudah dilaksanakan apabila pemerintah berhasil menyediakan akses sinyal internet/telepon selular kuat di seluruh pelosok nusantara. Ibarat jalan tol, akses sinyal kuat memberikan jalur cepat peningkatan literasi keuangan digital (akses kepemilikan rekening dan hp) terutama di daerah pelosok. Namun demikian, dengan segala exit strategy di atas, kunci utama untuk meraih peluang itu adalah vaksinasi guna terbentuknya herd immunity serta tidak adanya gelombang kedua dari wabah itu.

Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia

File ini dapat diunduh melalui : <http://lppi.or.id/produk/riset/>

Untuk korespondensi dan informasi lebih lanjut, hubungi :

Divisi Corporate Secretary (DCSC)

Telp: (021) 71790919 ext. 393 | Email: corsec@lppi.or.id

Website : www.lppi.or.id

Disclaimer: Tidak ada satu bagian pun dalam publikasi ini yang ditujukan sebagai promosi, penawaran, rekomendasi, nasihat investasi, atau untuk membentuk dasar keputusan-keputusan strategis atas suatu kegiatan, produk, dan/atau jasa dari pihak manapun. Oleh karena itu, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap keputusan pihak manapun.

